

Alternatif Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Studi Kasus di Provinsi Dki Jakarta

Alternative Local Government Policies in Overcoming Unemployment Case Study in DKI Jakarta Province

Zaenal Arifin

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9 Jakarta Pusat, 10110

*Email Korespondensi: zaenalarifin1974@gmail.com

ABSTRAK

Pada bulan Februari tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta mencapai 8,51 persen, hal ini melebihi angka pengangguran nasional sebesar 6,26 persen. Fenomena ini menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dapat menjadi sebuah isu yang memperihatinkan, Karena tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan persentase pengangguran di tingkat nasional. Tujuan penulisan penelitian ini adalah menyusun Alternative Kebijakan berupa Rencana Aksi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Studi ini memanfaatkan metode Strength, Weakness, Opportunities, Threats Analysis (SWOT Analysis) dan Threats, Opportunities, Strength, Weakness Analysis (TOWS Analysis). Adapun hasil yang didapat berdasarkan analisa dan pembahasan adalah banyak terdapat program kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengatasi masalah pengangguran di Wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi Terjadi peningkatan dalam kemampuan bersaing dari pekerja. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel penyusunan sasaran program dan kegiatan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan adalah meningkatkan daya saing tenaga kerja, terwujudnya kesempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Kata kunci: *Tingkat pengangguran Terbuka, Sasaran Program dan Kegiatan, Penyusunan Rencana Aksi Daerah*

ABSTRACT

In February 2021, the Open Unemployment Rate (TPT) in DKI Jakarta Province reached 8.51 percent, this exceeds the national unemployment rate of 6.26 percent. This phenomenon is of serious concern to the DKI Jakarta Provincial Government, where the high open unemployment rate can become a worrying issue because the open unemployment rate (TPT) in Jakarta has increased more significantly compared to the percentage of unemployment at the national level. The purpose of writing this research is to prepare an Alternative Policy in the form of a Regional Action Plan for DKI Jakarta Province to overcome the problem of unemployment. This study utilizes the Strength, Weakness, Opportunities, Threats Analysis (SWOT Analysis) and Threats, Opportunities, Strength, Weakness Analysis (TOWS Analysis) methods. The results obtained based on the analysis and discussion are that the DKI Jakarta Provincial government can carry out many program activities to overcome the problem of unemployment in the DKI Jakarta Province Region, including an increase in the competitive ability of workers. This can be seen in the preparation table of program targets and activities. The benefits of this research are expected to increase labour competitiveness, realize job opportunities and industrial relations that are conducive to developing businesses, and improve worker welfare to reduce unemployment.

Keywords: *Open unemployment rate, Program and Activity Targets, Regional Action Plan Preparation*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah mengalami penyebaran di lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 25 Juni 2021, jumlah kasus infeksi telah mencapai 179 juta dengan angka kematian sekitar 3,89 juta. Untuk mengurangi penyebaran virus, berbagai tindakan pencegahan telah dilakukan, seperti implementasi kebijakan *lockdown*, penutupan perbatasan, pembatasan perjalanan udara, dan pengaturan jarak sosial. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada tahun 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada tahun 2021. Keputusan ini berdampak negatif pada aktivitas ekonomi yang menurun, meningkatnya tingkat pengangguran, serta peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan. (Anas Azwar et al., 2021)

Kondisi ketenagakerjaan di Jakarta khususnya tingkat pengangguran saat ini sudah mulai membaik, namun demikian jumlah individu yang tidak bekerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam mencari pekerjaan pada bulan Februari tahun 2022 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan masa sebelum pandemi covid 19 sebesar 6,22 persen. Hal ini mengindikasikan kondisi ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya pulih.

Tingkat pengangguran terbuka di Jakarta menyentuh angka 10,95 persen pada periode Agustus 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19. Angka ini berhasil ditekan ke level 8,50 persen pada Agustus 2021 berkat tumbuhnya perekonomian di Jakarta sebesar 2,43 persen (y-o-y). (Jakarta Badan Pusat Statistik Provinsi DKI, 2022)

Jumlah pengangguran di Jakarta pada Agustus 2022 berkurang sebanyak 133 ribu orang dibandingkan Agustus 2020. Turunnya nilai Angka TPT (tingkat partisipasi tenaga kerja) mengalami peningkatan signifikan pada kedua gender. Tingkat partisipasi tenaga kerja pada laki-laki melebihi tingkat partisipasi tenaga kerja pada perempuan, dengan perbedaan sebesar 8,73 persen pada individu

laki-laki dan 8,12 persen pada individu perempuan.

Pengangguran merujuk pada kondisi dimana individu yang siap bekerja tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka, dimana terbanyak ada di Kota Jakarta Barat sebesar 26,75 persen atau sekitar 118 ribu orang. Sementara itu Persentase tertinggi TPT tercatat di wilayah Jakarta Utara, yaitu sebesar 9,84 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di wilayah Jakarta Selatan dengan angka 7,33 persen. Pengangguran didominasi oleh lulusan SMK sebesar 33,51 persen. Sementara itu, TPT tertinggi berasal dari lulusan SMA sebesar 10,85 persen.

TPT penduduk usia muda dua kali lebih besar daripada TPT usia 15 tahun ke atas. TPT usia muda sebesar 16,94 persen dengan nilai tertingginya di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 29,70 persen. Sementara menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT usia muda tertinggi terjadi pada lulusan SMA sebesar 20,95 persen dengan kata lain kondisi ketenagakerjaan di Jakarta khususnya tingkat pengangguran sudah mulai membaik, namun Jumlah individu yang tidak bekerja dan tingkat kedepan dari individu yang aktif mencari pekerjaan di bulan Februari 2022, nampak seperti itu dan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan masa sebelum pandemi covid 19 sebesar 6,22 persen. (Yuliyanti Rindi, 2022)

Tingginya tingkat pengangguran terbuka tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan, seperti :

1. Lapangan Kerja Yang Rendah

Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dihasilkan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja merupakan masalah ekonomi dan sosial yang signifikan di Indonesia. (Januariyansah et al., 2022). Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020, DKI Jakarta memiliki tingkat kesempatan kerja yang paling rendah di seluruh Indonesia, yaitu sebesar 89,05%. Provinsi-provinsi lain yang memiliki tingkat kesempatan kerja di bawah rata-rata nasional sebesar 92,93% adalah Banten (89,36%), Jawa Barat (89,36%), Riau (89,66%), dan Maluku (92,43%).

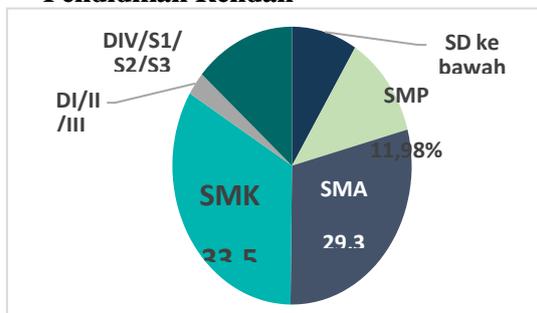
Tingkat Kesempatan Kerja DKI Jakarta Terendah Nasional



Gambar 1. Persentase Pengangguran menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DKI Jakarta, Agustus 2021

Selama wabah pandemi Covid-19, terjadi penurunan signifikan dalam tingkat kesempatan kerja secara nasional. Pada bulan Agustus 2020, tingkat kesempatan kerja nasional mencapai 92,93%, mengalami penurunan sebesar 1,84% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 94,77%.

2. Mental Lemah (Inferior) Kualitas Pendidikan Rendah



Gambar 2. Angka pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan yang dicapai di wilayah DKI Jakarta pada bulan Agustus 2021

Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah lemahnya mental di kalangan pelajar. Mentalitas yang lemah ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kurangnya motivasi, tidak tertarik dalam belajar, dan sikap pasif terhadap pendidikan, hal ini pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan karena siswa tidak sepenuhnya terlibat dan termotivasi untuk

belajar, akibatnya mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan yang mengarah pada prestasi akademik yang rendah dan kurangnya keterampilan berpikir kritis. Faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya yang tersedia di sekolah (Ananda & Zulfadewina, 2023)

Semakin bertambahnya jumlah lulusan dari berbagai jalur pendidikan, seperti SMK, SMA, dan perguruan tinggi, menghadirkan kendala dalam mencari lapangan pekerjaan yang cocok. Situasi ini menuntut adanya perubahan pola pikir bagi para lulusan tersebut. Mereka perlu mengalihkan fokusnya dari sekadar mencari pekerjaan kepada menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lulusan SMA, SMK, dan Perguruan tinggi cenderung lebih mengutamakan para lulusannya untuk bersiap-siap menjadi anggota tenaga kerja dibandingkan menggalang inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu faktor pemicu kemungkinan tersebut didasari oleh sistem pendidikan yang diterapkan di berbagai lembaga tersebut yang cenderung fokus pada persiapan siswa atau mahasiswa agar dapat lulus dengan cepat dan memperoleh pekerjaan, ketimbang memprioritaskan lulusan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. (Machmud & Suleman, 2022).

3. Ketergantungan Pada Lowongan Pekerjaan

Pandemi Covid-19 sudah memakan banyak korban jiwa. Tidak hanya aspek kesehatan, tetapi aspek ekonomi pun ikut terdampak akibat Covid-19. Banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena beberapa perusahaan tempat mereka bekerja terpaksa harus menutup bisnisnya (Utami & Nurwati, 2022)

Menurut laporan statistik yang diterbitkan oleh BPS DKI Jakarta, jumlah individu yang mencatatkan diri sebagai pengangguran pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 15,6 ribu orang. Sementara itu, jumlah lowongan kerja yang terdaftar hanya sekitar 14,6 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa hampir di seluruh wilayah Jakarta,

terdapat lebih banyak jumlah pencari kerja daripada lowongan kerja yang tersedia. Perbedaan jumlah yang paling signifikan terjadi di Jakarta Barat, Jumlah pencari kerja dan lowongan kerja memiliki selisih sekitar 3,8 ribu di seluruh wilayah, termasuk di Jakarta Selatan dimana terdapat lebih banyak lowongan kerja sebanyak 2,8 ribu dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang sama.

Dalam menghadapi situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta saat ini harus merancang strategi aksi yang berfokus pada penyelesaian pengangguran yang tepat dan sejalan dengan berbagai isu yang penting dalam konteks tersebut. (Dinar et al., 2022). Penyusunan *policy paper* dimaksudkan untuk menghubungkan dokumen perencanaan yang sudah ada dengan Kebijakan Alternatif yang berupa Rencana Aksi Daerah. Rencana Aksi Daerah merupakan dokumen yang berisikan tujuan, rencana tindakan, dan fokus kegiatan utama yang digunakan sebagai panduan bagi institusi dan pemerintah daerah dalam implementasi agenda kebijakan tertentu. Pada prinsipnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan mengadopsi langkah-langkah inovatif. Selain itu, dokumen kebijakan ini juga berisi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tambahan yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan yang ada saat ini, dengan harapan dapat memberikan dampak yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengatasi permasalahan pengangguran secara efektif.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang keadaan angka pengangguran yang masih memprihatinkan di DKI Jakarta dan inisiatif yang diambil oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menangani masalah ini, serta rencana yang sudah disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan sektor ketenagakerjaan. Penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik digunakan sebagai pendukung dan alat untuk memperoleh kesimpulan dalam upaya membantu berbagai pihak terkait dalam

menghadapi tantangan ketenagakerjaan di DKI Jakarta.

METODOLOGI

Dalam upaya menghadapi permasalahan pengangguran di Provinsi DKI Jakarta, sebuah pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) digunakan sebagai landasan untuk merekomendasikan kebijakan dan strategi penanggulangan.

Pendekatan analisis SWOT yang juga merupakan alat sederhana yang mampu menganalisa permasalahan pada suatu organisasi atau perusahaan dengan lingkungan eksternal dan internal. Pendekatan analisis SWOT juga dapat membuka peluang dan memberikan kesempatan bagi sebuah organisasi atau perusahaan dengan mengidentifikasi kelemahan, sehingga ancaman dapat diminimalisir, serta dapat menciptakan dan memilih alternatif dari strategi kebijakan yang akan di implementasikan (Prisdina & Fatururrahman, 2023a)

Dalam upaya menghadapi permasalahan pengangguran di Provinsi DKI Jakarta, sebuah pendekatan SWOT digunakan sebagai landasan untuk merekomendasikan kebijakan dan strategi penanggulangan. Analisis SWOT adalah suatu metode evaluasi yang berfokus pada kondisi internal dan eksternal organisasi, dengan tujuan untuk mengembangkan rencana strategis dan program kerja yang efektif. (Yuliyanti Rindi, 2022)

Proses analisis data melibatkan serangkaian langkah terstruktur untuk mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan membagikan temuan kepada pihak lain.

Berdasarkan penelitian kualitatif, beragam metode yang digunakan untuk menyajikan data meliputi narasi, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, narasi dianggap sebagai metode paling umum yang digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono. (Sugiyarto, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan menghadapi tantangan pembangunan ketenagakerjaan yang kompleks, Menteri Ketenagakerjaan telah mengumumkan 9 (sembilan) langkah utama untuk memperkuat sektor ketenagakerjaan dalam periode 2020-2024. (Mahatmi Parwitasari Saronto, 2022)

Sembilan Lompatan Besar terdiri dari transformasi Badan Latihan Kerja; keterkaitan dan pepadanan ketenagakerjaan; transformasi program perluasan peluang kerja; pengembangan bakat muda; perluasan pasar tenaga kerja internasional; visi baru terkait hubungan industrial; reformasi pengawasan; ekosistem digital SIAPKerja; dan reformasi birokrasi.

Sembilan lompatan ini guna merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. Terdapat sembilan strategi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor ketenagakerjaan. Strategi-strategi ini akan memberikan lompatan signifikan serta mengarahkan kebijakan yang tepat dalam upaya mencapai tujuan tersebut:

1. **Transformasi Balai Latihan Kerja**
Kebijakan ini bertujuan untuk mentransformasikan BLK menjadi suatu entitas yang difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja guna meningkatkan daya saingnya baik di tingkat nasional maupun global.
2. **Link and Match Ketenagakerjaan**
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dengan tujuan memperkuat efisiensi proses bisnis dan mempermudah penyesuaian antara orang yang mencari pekerjaan dengan permintaan pasar tenaga kerja..
3. **Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja**

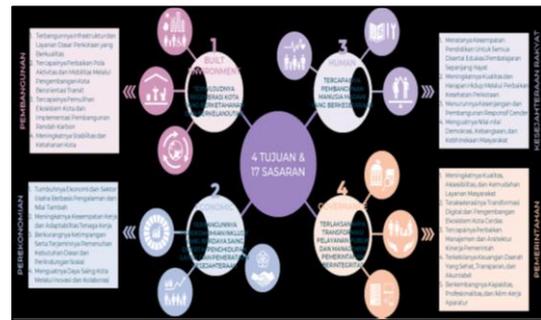
Tujuan utama ini adalah untuk menciptakan program yang berhasil dalam membantu orang memperoleh keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi tenaga kerja mandiri. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang berkelanjutan dan memberikan peluang kerja yang lebih luas kepada masyarakat. (Alif Salsabila Katya dan Saraswati, 2021)

4. **Pengembangan Talenta Muda**
Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan dan mengelola kapasitas inovatif dari generasi milenial agar mereka dapat menjadi potensi yang siap menghadapi pekerjaan yang dinamis dan fleksibel di masa depan.
5. **Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri**
Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan dan mengadministrasikan kapasitas inovatif dari generasi milenial sehingga mereka dapat menjadi calon talenta yang siap menghadapi pekerjaan di masa depan yang dinamis dan fleksibel.
6. **Visi Baru Hubungan Industrial**
Arah kebijakan: Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.
7. **Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan**
Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan, sehingga dapat memastikan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja (K3) yang berintegritas dan kredibel.
8. **Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan**
Maksud utama adalah mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan menjadi ekosistem digital terbesar di Indonesia.
9. **Reformasi Birokrasi**

- kerja, khususnya perempuan pekerja migran dan pekerja yang menghadapi kondisi darurat;
- h. Pada tahun 2030, upaya untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang memfasilitasi pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi tindakan yang vital dalam menghasilkan pekerjaan dan memperkuat keberlanjutan budaya dan produk lokal;
 - i. Meningkatkan kapabilitas institusi keuangan domestik dalam meningkatkan penetrasi dan ketersediaan sektor perbankan, asuransi, serta layanan pendanaan kepada seluruh populasi.
 - j. Dalam rangka meningkatkan Bantuan untuk Perdagangan (*Aid for Trade*) kepada negara-negara yang sedang mengalami perkembangan, terutama negara-negara dengan tingkat perkembangan yang rendah, diperlukan penggunaan Kerangka Kerja Terintegrasi yang Diperluas untuk memberikan Bantuan Teknis yang berhubungan dengan perdagangan kepada Negara-negara Kurang Berkembang.
 - k. Pada tahun 2020, telah direncanakan perancangan dan implementasi strategi global untuk menangani isu mengenai tenaga kerja muda serta menerapkan Pakta Kerja Global yang dipublikasikan oleh *International Labour Organization* (ILO).

Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 (RPD DKI Jakarta, 2022)

Konsep RPD Tahun 2023-2026 adalah JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA, yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*).



Gambar 4. Skema Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Sumber: Analisa Bappeda, 2022)

Kata kunci dari tujuan kedua ini yang meliputi 'Perekonomian Inklusif', 'Daya Saing', 'Penghidupan Layak', dan 'Pemerataan Kesejahteraan' menggambarkan kondisi perekonomian yang memastikan bahwa seluruh warga dapat mengakses dan mendapatkan manfaatnya, dengan fokus pada sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Jakarta. Sasaran ini bertujuan untuk mencapai 'pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor usaha berdasarkan pada pengalaman dan peningkatan nilai.' Selain itu, kata kunci lainnya terkait dengan daya saing yaitu mengadopsi indeks daya saing global yang mencakup kapasitas dan potensi Jakarta dalam bersaing dengan kota-kota global lainnya untuk menarik talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan lainnya.

Kata kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran 'Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi'. Kata kunci berikutnya terkait penghidupan layak adalah suatu kondisi dimana tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha, maupun resiliensi tenaga kerja terhadap tantangan. Untuk mencapai hal tersebut dirumuskan sasaran 'Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja'. Kata kunci terakhir yaitu pemerataan kesejahteraan, hal ini sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan golongan miskin dan rentan, sehingga dirumuskan sasaran 'Penurunan disparitas serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar

dan perlindungan sosial (Arifin Zaenal et al., 2022)

Renstra Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 (Renstra Dinas Tenaga Kerja, n.d.2022)

Berdasarkan Renstra Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, tujuan dan sasaran merujuk pada hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1-4 tahun berdasarkan visi dan misi RPD serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.. Maksudnya adalah mengarahkan pengelolaan penyusunan rumusan tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara spesifik dan dapat diukur dalam periode waktu yang lebih singkat daripada tujuan. Selain itu, dalam sasaran juga terdapat perencanaan program dan indikator program.

a) Sasaran 1: Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja

- Program utama adalah pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- Indikator keberhasilan program ini mencakup persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat, dan jumlah lembaga pelatihan yang telah terakreditasi.
- Selain itu, program ini juga memiliki fokus pada perencanaan tenaga kerja, dengan dokumen perencanaan tenaga kerja sebagai indikator keberhasilannya.

- Sasaran program ini adalah terciptanya kesempatan kerja yang lebih banyak.
- Selanjutnya, program ini juga bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja dengan baik dalam dunia kerja, dengan jumlah penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja sebagai indikatornya.
- Sasaran kedua dari program ini adalah terwujudnya hubungan industri yang kondusif, yang dapat meningkatkan usaha dan kesejahteraan pekerja.
- Program yang terkait dengan hal ini adalah program hubungan industrial, dengan jumlah perusahaan yang menerapkan saran hubungan industrial dan jaminan sosial menjadi indikator keberhasilannya.
- Selain itu, ada juga program pengawasan ketenagakerjaan, dengan persentase perusahaan yang tidak memiliki tenaga kerja, jumlah perusahaan besar dan menengah yang memiliki kondisi kerja dan kesehatan sesuai standar menjadi indikatornya..

Kebijakan Alternatif Beberapa Aspek Mengurangi Pengangguran

Berdasarkan kajian mengenai permasalahan pengangguran di Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa faktor yang terkait dengan usaha untuk mengurangi pengangguran, yaitu melalui analisis ketenagakerjaan, kebijakan, dan struktur industrial, hal ini terlihat jelas dalam matriks SWOT sebagai berikut.:

Tabel 1. Analisis SWOT

	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan(<i>Weaknesses</i>)
Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya tenaga kerja usia produktif yang banyak • Banyaknya usia produktif yang suka <i>enterprenership</i> • Lulusan Perguruan Tinggi yang mengalami pengangguran memiliki keahlian akademik yang memadai. • Lowongan pekerjaan dapat ditemukan melalui <i>website</i> yang terkait dengan organisasi pemerintah daerah dan media sosial, serta melalui asosiasi terkait. • Entitas pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Latihan Kerja Indonesia (BLKI) menyediakan pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja tingkat dasar. • Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki program utama yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kekurangan lowongan pekerjaan di pasar tenaga kerja. • Keterbatasan informasi pekerjaan yang disediakan oleh Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan akses informasi terbatas bagi pencari kerja. • Koordinasi yang buruk antara Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pencari kerja. • Banyak lulusan perguruan tinggi mencari informasi pekerjaan sendiri. • Tidak semua Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya tenaga kerja dan energi di wilayah DKI Jakarta. secara rutin mengadakan <i>Job Fair</i>. • Tidak mudah mengakses informasi mengenai <i>Job Fair</i> dan lowongan pekerjaan di tingkat kelurahan dan kecamatan. • Lulusan perguruan tinggi lebih memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. • Tingkat kreativitas dan inovasi penganggur lulusan perguruan tinggi di tingkat kelurahan rendah. • Kurangnya keterampilan sosial dan etos kerja pada tenaga kerja. • Fokus pelatihan dari Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pencari kerja & BLK belum memenuhi kebutuhan lulusan perguruan tinggi. • Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pencari kerja masih belum menyediakan data pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. • Sejumlah besar individu yang telah berhasil memperoleh pekerjaan, namun belum melaporkannya kepada Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pencari kerja setempat. • Adanya Pelatihan tenaga kerja dan program-program UMKM di DKI Jakarta hanya pelatihan-pelatihan biasa, belum

		<p>komprehensif. Padahal yang paling dibutuhkan adalah akses pada permodalan ringan, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, dengan pembinaan mental spiritual yg menerangkan).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan UMKM hanya menyodorkan UMKM ke Bank dengan bunga tinggi. Selain itu, Penertiban utk “mengusir mereka” dari lokasi berjualan . • Tidak ada program khusus bagi peningkatan daya saing UMKM
	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Ada lapangan pekerjaan yang tersedia di sektor perkebunan, baik di dalam maupun di luar Provinsi DKI Jakarta. • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membutuhkan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi. • Pasar kerja memiliki kebutuhan yang banyak terhadap lulusan perguruan tinggi yang memiliki spesialisasi tertentu. • Sektor usaha lebih mengedepankan pelamar yang memiliki pengalaman kerja, bersedia ditempatkan di berbagai wilayah, dan memiliki etos kerja yang baik. • Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pencari kerja siap menyediakan bantuan bagi pengangguran agar bisa memasuki dunia kerja. • Masih ada potensi sumber daya alam dan unggulan yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam pengembangan industri hilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai wilayah memiliki informasi pasar tenaga kerja di dunia usaha. • Terjadi persaingan yang sengit dari lulusan perguruan tinggi di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta. • Kebutuhan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di dunia usaha di Provinsi DKI Jakarta hanya sebesar 15% dari total tenaga kerja. • Meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di dunia usaha disebabkan oleh fluktuasi perkembangan ekonomi. • Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tingkat lanjut menyebabkan persaingan yang ketat.

Beberapa Hal Strategis Kebijakan Alternatif

Berdasarkan evaluasi SWOT yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor strategis yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya.

pembuatan kebijakan alternatif berupa Rencana Aksi Daerah di Provinsi DKI Jakarta yang bersifat terobosan untuk mengurangi pengangguran yang disajikan dalam matrik TOWS berikut :

Tabel 2. Analisis TOWS

	<i>Weaknesses</i>	<i>Strengths</i>
<i>Opportunities</i>	<p>a. Peningkatan peningkatan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kualifikasi dan pekerjaan spesifik, serta upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja.</p> <p>b. Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan dan peningkatan sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan serta pembinaan tenaga pelatihan.</p> <p>c. Mengembangkan industri hilir dengan memanfaatkan kondisi dan potensi serta peluang yang ada.</p> <p>d. Dalam rangka memperoleh informasi mengenai lowongan kerja dari perusahaan, diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas mengelola <i>website</i> Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pencari kerja.</p> <p>e. Membuat suatu aplikasi yang bertujuan memberikan informasi terpadu mengenai peluang kerja, lengkap dengan Standar Operasional Prosedurnya (SOP), yang dapat diakses oleh perusahaan serta lulusan dari sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.</p> <p>f. Pelatihan tenaga kerja dan program-ptogtam UMKM Penyodoran UMKM ke Bank Penertiban.</p>	<p>a. Dalam rangka memetakan potensi lulusan SMK dan perguruan tinggi, Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pencari kerja berkolaborasi dengan SMK dan perguruan tinggi.</p> <p>b. Mengadakan pameran lowongan pekerjaan yang mencakup wilayah kecamatan.</p> <p>c. Perusahaan memberikan sosialisasi kepada SMK, SMA, dan perguruan tinggi mengenai standar kategori tenaga kerja yang diperlukan.</p>
<i>Threats</i>	<p>a. Meningkatkan kerja sama antara lembaga pendidikan menengah kejuruan dengan institusi pendidikan tinggi serta perusahaan yang menyediakan program pelatihan bertujuan untuk memperbaiki persiapan tenaga kerja.</p> <p>b. SMK dan Perguruan Tinggi juga menyelenggarakan kegiatan pameran pekerjaan.</p>	<p>a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi menyukseskan nota kesepahaman antara lembaga pendidikan tinggi dan perusahaan dengan tujuan memperkuat saluran komunikasi terkait pasar tenaga kerja. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat bekerja sama secara sinergis dalam menjaga kesesuaian antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.</p> <p>b. Meningkatkan jumlah Pusat Latihan Kerja (BLK) dan mengintegrasikan perusahaan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi, seperti pengelola BLK yang mengadakan pelatihan e-bisnis.</p>

Penanggulangan pengangguran tidak hanya diarahkan kepada penyediaan lapangan pekerjaan yang banyak, akan tetapi perlu juga diperhatikan peningkatan Kompetitivitas angkatan kerja dan pencapaian hubungan industri yang mendukung perkembangan bisnis dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. (Prisdina & Fatururrahman, 2023)

Sehubungan dengan itu, dalam upaya mengatasi masalah pengangguran dalam rangka mengurangi kemiskinan perlu dilakukan penyusunan perencanaan dan implementasi penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI. Berdasarkan pengidentifikasian permasalahan dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta penyusunan strategi TOWS (Swasembada Daging Sapi et al., n.d.), maka salah satu upayanya adalah penyusunan rencana aksi daerah yang berisikan sasaran, program dan kegiatan yang dianggap penting dan mesti dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI, meliputi:

(i) Peningkatan daya saing tenaga kerja

Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Para tenaga kerja yang tersedia perlu terus memperbarui pengetahuan mereka dan memperoleh keterampilan baru agar tetap relevan di pasar kerja saat ini (Amira et al., 2022). Hal ini dapat dicapai melalui partisipasi dalam program pelatihan yang meningkatkan keterampilan teknis dan lunak dengan terlibat secara aktif dalam program-program ini, dimana para tenaga kerja yang tersedia dapat meningkatkan posisi mereka di pasar tenaga kerja dan meningkatkan peluang mereka untuk dipekerjakan atau dipromosikan, seperti upaya untuk meningkatkan tingkat kewirausahaan, kreativitas, inovasi, keterampilan digital, dan keterampilan global di SMK, mahasiswa, dan lulusan perguruan tinggi. (Anwar, 2019):

- a. Memperpanjang durasi magang/pelatihan menjadi 6 bulan
- b. Meningkatkan jumlah mata kuliah yang secara khusus didesain untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan di bidang industri kreatif.
- c. Menambah jumlah mata kuliah yang berbasis industri kreatif

(ii) Terwujudnya kesempatan kerja

Di pasar kerja global dan sangat kompetitif saat ini, ketersediaan peluang

kerja telah menjadi perhatian mendesak bagi individu yang mencari pekerjaan. Iklim ekonomi saat ini, dikombinasikan dengan kemajuan teknologi dan tenaga kerja yang semakin terampil, telah menciptakan situasi di mana pencari kerja harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang diperlukan untuk menonjol dari persaingan. Memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas pembelajaran yang dibutuhkan untuk berkembang di pasar kerja yang dinamis ini menjadi sangat penting bagi calon karyawan (Wongnaa & Boachie, 2018), untuk itu perlu upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui :

- a. Menambah SDM pengelola *website* Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pencari kerja guna mendapatkan informasi lowongan kerja dari perusahaan
- b. Membangun sebuah platform aplikasi yang dirancang khusus dengan tujuan menyediakan pusat informasi yang terintegrasi mengenai peluang kerja. Aplikasi ini didesain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan maupun lulusan SMK dan perguruan tinggi, dengan menyertakan langkah-langkah operasional yang telah teruji untuk mencapai kesuksesan.
- c. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan potensi lulusan SMK dan perguruan tinggi, Dinas Tenaga Kerja dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemetaan potensi tersebut.
- d. Menyelenggarakan *job fair* hingga di kecamatan
- e. SMK dan Perguruan tinggi juga melaksanakan bursa kerja

(iii) Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja perlu diupayakan guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak.

Dalam sebuah perusahaan, baik pengusaha maupun pekerja memiliki kepentingan yang saling terkait terhadap kelangsungan usaha dan kesuksesan perusahaan. Meskipun demikian, perselisihan sering kali

terjadi antara pengusaha dan pekerja. Dalam situasi seperti ini, perundingan bipartit dapat dijadikan solusi utama untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis.

Hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja menjadi kunci penting dalam menghindari Pemutusan Hubungan Kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan menciptakan peluang kerja baru untuk mengatasi pengangguran di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Pemda DKI Jakarta perlu melakukan upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut.:

- a. Perusahaan menyampaikan informasi mengenai kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan kepada sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi.
- b. Optimalisasi kerja sama antara SMK dan perguruan tinggi dengan perusahaan yang memiliki lembaga latihan dalam Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pencari kerja mendukung kerjasama antara perguruan tinggi dan perusahaan melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendirikan forum komunikasi yang

bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam persiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

- c. Suatu usulan akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah Pusat Latihan Kerja (PLK) dan menciptakan sinergi antara perusahaan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi, contohnya dengan mengimplementasikan pengelolaan BLK yang menghasilkan pelatihan e-bisnis.

Rencana Aksi Daerah

Berdasarkan tinjauan permasalahan dan beberapa aspek yang terkait dengan upaya untuk mengurangi pengangguran di Provinsi DKI Jakarta serta beberapa hal strategis kebijakan alternatif, penyusunan sasaran program dan kegiatan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran yang tepat di DKI Jakarta tersebut dapat diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah yang di diharapkan dapat menjadi dokumen acuan penyusunan rencana program dan kegiatan. Adapun penyusunan Rencana Aksi Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Aksi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Mengatasi Masalah Pengangguran

Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan
Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat keahlian lulusan pelatihan yang berhasil dicapai berdasarkan persentase. - Jumlah individu yang berhasil memperoleh sertifikat sebagai bukti keterampilan 	<p>Meningkatnya pemberian pelatihan yang fokus pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kualifikasi dan pekerjaan tertentu, serta meningkatnya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja dan program-ptogtam UMKM Penyodoran UMKM ke Bank Penertiban</p> <p>Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan dan peningkatgan sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan serta pembinaan tenaga pelatihan, Memperbanyak BLK dan</p>

		yang dimiliki oleh tenaga kerja. - Jumlah Lembaga pelatihan yang terakreditasi	mensinergikan perusahaan dengan SMK dan perguruan tinggi misalnya BLK pengelola penghasil, pelatihan e-bussines
Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan
Terwujudnya kesempatan kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan kuantitas tenaga kerja yang ditempatkan dan ekspansi pekerjaan.	Penyediaan bursa kerja dan informasi tentang pasar kerja, pengembangan kesempatan kerja di dalam dan di luar hubungan kerja, fasilitas penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia sebelum dan setelah penempatan, serta peningkatan kerjasama antar daerah, merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akses angkatan kerja ke dunia kerja
Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	- Program Hubungan Industrial	- Banyak perusahaan yang menerapkan strategi terkait keterkaitan antara aspek industri dan jaminan sosial	Peningkatan kapasitas sertifikat pekerja dan pengusaha dapat dicapai melalui pelatihan, sosialisasi, dan penguatan kelembagaan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengupahan yang adil dan program perlindungan sosial bagi pekerja. Untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, kerja sama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perguruan tinggi, dan perusahaan yang memiliki lembaga latihan dapat dioptimalkan. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Energi Provinsi DKI Jakarta dapat memfasilitasi kesepakatan kerja sama antara perguruan tinggi dengan perusahaan melalui pembentukan forum komunikasi. Tujuan dari forum ini adalah agar kebutuhan perusahaan dan lulusan perguruan tinggi dapat saling bersinergi dan menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan perusahaan. Peningkatan pelayanan pengawasan dan Kesehatan kerja

	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Tenaga Kerja - Penunjang Urusan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak perusahaan besar dan menengah memiliki kondisi kerja dan kesehatan yang sesuai dengan standar lingkungan - Tersusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja - Terselenggaraan Pelayanan ketenagakerjaan 	<p>untuk perusahaan dan tempat kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, Monev dan Pelaporan - Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Naskah Dinas dan Kerumahtanggaan - Pengelolaan Barang - Pengelolaan TIK dan Informasi
--	---	---	---

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka untuk mengatasi masalah pengangguran di DKI Jakarta diperlukan perencanaan dan implementasi sasaran program dan kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengatasi masalah pengangguran yang tepat. Sasaran program dan kegiatan meliputi: peningkatan daya saing tenaga kerja, terwujudnya kesempatan kerja, dan terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Saran

1. Perlu ada prioritas program dan kegiatan khusus terkait peningkatan daya juang dan daya saing bagi angkatan kerja, khususnya dalam hal : (a) Cara pandang dimana sangat diperlukan reformasi pendidikan dalam

mencapai tingkat kesetaraan, (b) Gaya hidup peningkatan penguatan mental dan daya juang yang tidak hedon dan tidak mudah kena rayu pinjol, (c) Kolaborasi yang menyediakan ruang-ruang diskusi/kolaborasi untuk kepemimpinan AM, (d) Peningkatan UMKM perlu dilakukan mentoring dan bantuan permodalan dalam rangka mendorong kewirausahaan.

- 2 Tipe Gen Z dan Milenial berbeda dan mudah ganti karena cenderung mencari kenyamanan. Mereka lebih senang menjadi *entrepreneur* daripada pegawai yang pulang dan pergi setiap hari. Mereka umumnya cerdas, dan penuh dengan *source* video *youtube* untuk belajar sesuatu karena itu diperlukan pelatihan-pelatihan yang lebih cocok untuk yang *global level skill*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira, S., Jenawi, B., & Sujarwani, R. (2022). Strategi Kebijakan Mengatasi Pengangguran Terbuka Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Di Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 958–995.
<https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.92>
- Ananda, S. R., & Zufadewina, Z. (2023). Analysis of the Effect of Powtoon Application Interactive Learning Media on Mathematics Learning Ability of Elementary School Students. *Jurnal Paedagogy*, 10(1), 268.
<https://doi.org/10.33394/jp.v10i1.5688>
- Anas, Azwar. (2021). The Tranformation Of Social Aid During Large-Scale Social Restrictions And Pbulic Activity Restriction. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(1), 257–268.
<https://ejournal-bpsdm.jakarta.go.id/index.php/monas/issue/view/6>.
<https://doi.org/10.54849/monas.v3i1.69>
- Anwar, S. (2019). Revolusi Industri 4.0 Islam Dalam Merespon Tantangan Teknologi Digitalisasi. *Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 16.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1709867&val=18576&title=REVOLUSI Industri 4.0 Islam Dalam Merespon Tantangan Teknologi Digitalisasi](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1709867&val=18576&title=REVOLUSI%20Industri%204.0%20Islam%20Dalam%20Merespon%20Tantangan%20Teknologi%20Digitalisasi).
- Arifin, Zaenal. (2022). The Influence Of Gross Regional Domestic Product (GRDP and Regional Spending on Regional Original Income Period 2010-2019 In DKI Jakarta Province. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 4(1), 397–405.
<https://ejournal-bpsdm.jakarta.go.id/index.php/monas/issue/view/6>.
<https://doi.org/10.54849/monas.v4i1.95>
- Dinar, M. I., Sifa, N., & Nurfahmiyati, N. (2022). Strategi Dalam Mengatasi Pengangguran Akibat Covid-19 Di Kelurahan Sukagalih Kota Bandung. *Bina Ekonomi*, 26(1), 63–75.
<https://doi.org/10.26593/be.v26i1.5440.63-75>
- Dinas Tenaga Kerja, T. dan E. P. D. J. (n.d.). *Renstra DTKTE 2023-2026*. Retrieved December 14, 2023, from <https://disnakertrans.jakarta.go.id/>
- Jakarta Badan Pusat Statistik Provinsi DKI. (2022). *Profil Pengangguran Provinsi DKI Jakarta 2021*.
<https://jakarta.bps.go.id/publication/2022/08/31/4ff8f6a8c9f1a82306432db9/profil-pengangguran-provinsi-dki-jakarta-2021.html>
- Bappeda DKI Jakarta. (2022). *Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026*. 21(1), 1–9.
<https://bappeda.jakarta.go.id/dokumen-rencana-pembangunan-daerah-tahun-2023-2026/>
- Januariyansah, S., Putra, R., Erni, E., Iskandar, H., & Gunawan, S. (2022, December 29). *The Urgency of Employability Skills for Vocational Graduates in the Job Market*.
<https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2022.2325390>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI. (2021). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable*

- Development Goals (SDGs) 2021-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 465. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Mahatmi Parwitasari Saronto, S. M. K. D. K. P. (2022). *Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan*. 1–31. <https://www.bappenas.go.id/unit-kerja/0302>
- Machmud, J., & Suleman, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran (Studi Kasus Di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango). *JPPE : Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.31314/jppe.v5i1.1744>
- Prisdina, N. B., & Fatururrahman, M. (2023a). Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Peralatan Pelabuhan Dengan Menggunakan Pendekatan Analisis Swot Pada Pt Towin Innoven. *Jurnal Lentera Bisnis*, 12(1), 42. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i1.666>
- Prisdina, N. B., & Fatururrahman, M. (2023b). Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Peralatan Pelabuhan Dengan Menggunakan Pendekatan Analisis Swot Pada Pt Towin Innoven. *Jurnal Lentera Bisnis*, 12(1), 42. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i1.666>
- Alif Salsabila Katya dan Saraswati. (2021). Pemerintahan Kolaboratif Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Melalui Program Jakpreneur. *Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(2), 309–320. <https://ejournal-bpsdm.jakarta.go.id/index.php/monas>
- Sugiyarto, N. (2022). *Dampak Krisis Ekonomi Global Terhadap Kondisi*. 2, 1257–1266. <https://sosains.greenvest.co.id>
- Swasembada Daging Sapi, P., Jakarta, A., & Pangan dan Pertanian BAPPENAS, D. (n.d.). *Naskah Kebijakan (Policy Paper): Strategi dan Kebijakan dalam Percepatan*. www.bappenas.go.id
- Utami, F. A., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Pada Karyawan Fun World (Tempat Bermain Anak) Di Kota Cirebon. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.28124>
- Yuliyanti Rindi, N. H. (2022). Strategi Mengatasi Pengangguran Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 302–309. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8114>